e-ISSN: 2550-0813 | p-ISSN: 2541-657X | Vol 10 No 3 Tahun 2023 Hal. : 1253-1264

NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial

available online http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index

POLA REKRUTMEN PDI-PERJUANGAN DALAM KANDIDASI CALON KEPALA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2020

Harjuno Saputro, Robi Cahyadi Kurniawan, Bendi Juantara

Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Lampung

Abstrak

Penetapan kandidat calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Pesawaran yang diutus oleh PDI-Perjuangan memperlihatkan perbedaan yang terjadi antara regulasi partai dan keadaan lapangan yang memperlihatkan kemungkinan terjadinya permainan di dalam penetapan kandidat calon bupati dan calon wakil bupati Kabuipaten Pesawaran. Kabupaten Pesawaran mempunyai kader yang memiliki loyalitas tinggi terhadap PDI-Perjuangan yang merupakan Ketua DPC pada saat itu tetapi tidak mendapatkan rekomendasi dari PDI-Perjuangan dalam kompetisi pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020. Tujuan penelitian ini ialah untuk mngetahui Pola Rekrutmen PDI-Perjuangan dalam kandidasi calon Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran tahun 2020. Teori di dalam penelitian ini tahapan rekrutmen politik yang dikemukakan oleh Syamsuddin Haris (2005:44) dan pola rekrutmen politik yang dikemukakan oleh Nazaruddin Syamsudin dalam Hesel Nogi Tangkilisan (2003:189). Metode penelitian ini ialah kualitatif pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di dalam tahapan rekrutmen dari penjaringan bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati sampai dengan penetapan calon bupati dan calon wakil bupati terdapat dua pola rekrutmen yang digunakan PDI-Perjuangan dalam tahapan rekrutmen ini. Di tahap penjaringan sampai tahap penyaringan PDI- perjuangan menggunakan mekanisme pola rekrutmen terbuka namun pada tahap penetapan calon PDI-Perjuangan menggunakan mekanisme pola rekrutmen tertutup.

Kata Kunci: Tahapan rekrutmen, Pola rekrutmen, dan PDI-Perjuangan.

*Correspondence Address : harjunosaputro12@gmail.com
DOI : 10.31604/jips.v10i3.2023.1253-1264
© 2023UM-Tapsel Press

PENDAHULUAN

Rekrutmen politik dan penetapan calon kandidat merupakan dua hal yang memiliki kaitan sangat erat, yaitu rekrutmen politik bisa menunjang keberlangsungan partai politik dalam pelaksanaan penetapan calon kandidat kepala daerah. Hal ini menjadikan isu penetapan calon kandidat banyak disoroti karena tidak sedikit calon-calon kandidat kepala daerah yang berpindah partai demi mendapatkan dukungan partai. Rekrutmen politik pada dasarnya memiliki tujuan untuk menghasilkan kader-kader partai politik yang berkualitas.

Rekrutmen merupakan kelanjutan dari fungsi menangkap, memelihara dan menggunakan kekuasaan. Tugas ini dapat diselesaikan jika partai politik memiliki kekuatan pendukung yang kuat. Dukungan yang kuat dari anggota pendukung dan masyarakat dalam pemilu merupakan prasyarat untuk perebutan, retensi dan penggunaan kekuasaan dengan menempatkan kader PDI-Perjuangan terbaik di lembaga-lembaga negara. Kemampuan berpikir dan beraksi yang mumpuni untuk menyiapkan kader menjadi pemimpin yang berintegritas bagi partai, bangsa, dan negara (Panantang, 2014).

Kaderisasi adalah proses regenerasi partai politik menghasilkan individu-individu baru yang berkualitas dan menjamin mobilitas elite partai. Sesuai dengan peran partai politik untuk berpartisipasi dalam politik dan pemerintahan, langkah selanjutnya adalah menentukan kerangka calon pejabat publik. (Pamungkas, 2009). Sumber daya kader diperoleh dengan berbagai cara. Pertama, dari partai politik hingga pendidikan dasar politik hingga acara seperti pentas seni, pengabdian masyarakat saat bencana alam dan diskusi kelompok. Kedua, dari sayap organisasi yang sengaja dibentuk untuk menjaring calon kader dan ormas untuk memimpin partai, terutama dari generasi muda yang memungkinkan. Ketiga, dari organisasi atau komunitas mahasiswa yang memiliki ideologi yang sama dengan partai (Hamid, 2008:14).

Dalam proses pengkaderan, kader partai dikerahkan sedemikian rupa sehingga dapat mengisi jabatan-jabatan kepengurusan berdasarkan kemampuan dan bakatnya. Kapasitas seorang anggota dinilai dari kapasitasnya sebagai politikus atau birokrat. (Erawan, 2005:44). Partai politik dengan kader handal dan matang yang cukup banyak tidak mengalami kesulitan untuk mengangkat beberapa kadernya ke jabatan publik, yang terpenting di sini adalah aturan main yang mengatur tahapan-tahapan yang harus dilalui kader untuk naik jabatan. Jadi prosesnya bukan berdasarkan persahabatan dengan elite partai atau seberapa besar modal yang mereka miliki. Ketika datang untuk mengukur daya tarik pembalikan yang diusulkan, itu diukur dengan penerimaan dan penguatannya oleh basis massa dan masyarakat.

Tabel 1. Fenomena pindah partai politik untuk mencalonkan diri sebagaikepala daerah di Indonesia

No.	Nama Calon	Partai Awal	Partai Pengusung
1.	Emil Dardak (Calon Wakil Gubernur Jawa Timur)	PDI-P	Golkar
2.	Ratu Munawaroh (Calon Wakil GubernurJambi)	PAN	PDI-P

Sumber:tribunnews.com dan media Indonesia.com (data diolah, 2021)

Tabel 2. Fenomena pindah partai politik untuk mencalonkan diri sebagaiKepala Daerah di Provinsi Lampung

No.	Nama Calon	Partai Awal	Partai Pengusung
1.	M. Nasir (Calon Bupati Pesawaran)	PDI-P	PAN dan Nasdem
2.	Tulus Purnomo	PDI-P	Demokrat, PAN,PKB,

	(Calon Wakil Walikota Bandar Lampung)		Perindo, dan PPP
2.	Sudibyo (Calon Wakil Bupati Lampung Timur)	Golkar	PDI-P, Gerindra, dan PKS

Sumber: lampungpro.com, kumparan.com, dan medcom.id (data diolah, 2021)

Data pada tabel 1 dan 2 menunjukkan bahwa tindakan pindah-pindah partai juga memunculkan pertanyaan mengenai banyak hal yaitu rekrutmen dan kandidasi. Hal ini dapat dikaitkan juga pada oligarki yang merupakan hal yang sudah menjadi wajar di dalam dunia politik Indonesia, yang mana oligarki bisa menyebabkan hal-hal yang tak terduga dalam dunia politik.Sebab belum tentu partai politik baru yang merekomendasikannya mempunyai kesamaan ideologi dengan partai lama yang telah membesarkannya. Fungsi rekrutmen dalam partai politik pun menjadi andil sebab musabab banyaknya kader berpindah haluan partai dalam merekomendasikan calon kepala daerah, dan bisa dikatakan bahwa pola rekrutmen dalam partai politik belum berjalan dengan baik dan sebagai mana mestinya yang seharusnya bisa menjadi jembatan bagi kader partai politik untuk memegang kekuasaan tetapi banyak juga kader partai yang berpindah partai demi mendapatkan kekuasaan.

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi yang cirinya kekuasaan tertinggi tetap berada di tangan rakyat. Dalam memilih pemimpinnya, masyarakat Indonesia biasanya mengadakan pemilihan umum secara langsung untuk pemilihan eksekutif, legislatif, kepala daerah, dan kepala desa. Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam dunia politik yang biasa kita anggap sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. Melalui pemilu, masyarakat dapat langsung memutuskan proses politik di daerahnya. Proses penetapan calon kepala daerah diawali dengan proses rekrutmen yang dilakukan secara terbuka maupun tertutup oleh partai.

Dalam proses internal partai, terdapat fungsi partai politik yang sangat berpengaruh dan sangat penting untuk dibahas yaitu fungsi rekrutmen. Fungsi ini berkaitan erat dengan persoalan memilih pemimpin, baik pimpinan internal partai maupun pimpinan nasional secara luas. Selain itu proses rekrutmen juga berfungsi untuk mencari dan mengajak orang-orang yang melalui berbagai proses seleksi memiliki kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik, kemudian di promosikan menjadi kader partai atau calon kepala daerah. Pada tahun 2020, pemilihan kepala daerah akan diselenggarakan di beberapa daerah di Indonesia. Salah satu wilayah administratif di Indonesia yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah adalah Kabupaten Pesawaran.

Melihat fakta di lapangan pada Pilkada Kabupaten Pesawaran yaitu M. Nasir yang merupakan ketua DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Pesawaran tidak mendapatkan rekomendasi dari partai yang membuat M. Nasir harus berpindah partai lain untuk mendapatkan rekomendasi dan maju pada Pilkada Kabupaten Pesawaran. Namun fakta di lapangan, perintah dari ketua DPD PDI-Perjuangan untuk kader yang ada di Kabupaten Pesawaran tidak diindahkan, karena pada saat pendaftaran calon kepala daerah kader PDI- Perjuangan terlihat mendampingi M. Nasir dalam mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah walaupun tidak diusung dan direkomendasikan oleh PDI-Perjuangan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti memfokuskan penelitian terkait menganalisis pola rekrutmen PDI-Perjuangan dalam

kandidasi calon Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2020.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pesawaran terutama di Dewan Perwakilan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Pesawaran yakni lembaga terkait rekrutmen dan kandidasi calon Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model analisis data milik Seiddel. Dalam model ini, cara menganalisis data adalah dengan menggunakan cara mencatat, mengumpulkan, dan berfikir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penentuan hasil kandidasi berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara yang mendalam dan dokumentasi sebagai hasil pengumpulan data. Kemudian dilakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menggunakan teori Tahapan Rekrutmen Politik menurut Syamsuddin Haris (2005:44) dan Pola Rekrutmen Politik menurut Nazaruddin Syamsudin (Tangkilisan, 2003:189), sehingga nantinya akan menjawab masalah penelitian ini. Untuk menjelaskan Pola Rekrutmen PDI-Perjuangan Dalam Kandidasi Calon Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2020.

1. Tahapan Rekrutmen PDI-Perjuangan dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran.

Menurut Syamsuddin Haris (2005:44), Dalam rekrutmen partai politik terdapat tiga tahap penting. Yang pertama adalah pemilihan kandidat, tahap ini tentang interaksi antara elit partai atau cabang partai di tingkat lokal dan elit partai di tingkat atas atau sub level. Kedua, penyaringan dan seleksi kandidat yang direkrut. Tahap ini meliputi interaksi antar elit di tingkat daerah dan di cabang daerah. Ketiga, penetapan calon. Pada tahap ini terjadi interaksi antara elit tingkat pengurus daerah, khususnya para pengurus partai harian, dan tim kecil yang dibentuk dan diberi wewenang untuk menyeleksi para calon.

PDI-Perjuangan sudah mengatur tentang mekanisme rekrutmen pencalonan kepala daerah yang tertuang dalam peraturan partai No. 24 Tahun 2017 tentang rekrutmen dan seleksi kepala daerah yang diusung oleh PDI-Perjuangan. *Pertama*, Tahap Pendaftaran atau Penjaringan, Tahap yang dilakukan di tingkat DPC maupun DPD dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh DPP PDI-Perjuangan. *Kedua,* Tahap Verifikasi dan Validasi Dokumen, Tahap ini merupakan tahap peninjauan kembali yang dilakukan guna mengecek kembali berkas maupun dokumen dari bakal calon kandidat kepala daerah di setiap tingkatan partai, baik DPC, DPD, maupun DPP. *Ketiga,* Tahap Penyaringan, Tahap ini merupakan tahap yang dilakukan oleh tingkat DPP dengan berbagai mekanisme yang ditentukan salah satunya ialah melakukan *fit and proper test* kepada bakal calon kepala daerah dan bakal calon wakil kepala daerah. Selain itu DPP PDI-Perjuangan juga meminta keterangan dan pertimbangan pihak DPC dan DPD guna mendapatkan hasil yang sesuai dengan laporan. *Keempat,* Tahap Penetapan, Tahap ini merupakan tahap yang dilakukan di tingkat DPP PDI-Perjuangan melalui mekanisme sidang pleno untuk menentukan calon kepala daerah. Dalam setiap penentuan calon kepala daerah PDI-Perjuangan selalu menetapkan dan memutuskan selalu satu pasang yaitu calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. DPP PDI-

Perjuangan memiliki hak mutlak untuk menentukan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. *Kelima,* Tahap Sekolah Partai, Tahap sekolah partai merupakan tahapan yang dilakukan oleh DPP PDI-Perjuangan guna mempersiapkan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah dalam merepresentasikan visi dan misi partai dan tahap ini memiliki tujuan sebagai acuan bagi para calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah belajar dari kepala daerah yang telah sukses menjadi kepala daerah yang diusung PDI-Perjuangan.

Di dalam peraturan partai PDI-Perjuangan terdapat aturan yang mengatur tentang rekrutmen dan seleksi kepala daerah dan wakil kepala daerah yangakan diusung oleh PDI-Perjuangan. Setiap calon kandidat melalui tahapan yang sama sesuai dengan aturan yang ada. Tahap yang pertama ialah pendaftaran yangdilakukan oleh semua tingkatan kepengurusan PDI-Perjuangan baik tingkat DPC, DPD, maupun DPP. Tahap yang kedua ialah verifikasi dan validasi data maupun dokumen para calon kepala daerah yang akan diusung oleh PDI-Perjuangan.Tahap yang ketiga ialah Penyaringan, yang pertama kali dilakukan di DPC, kedua kali dilakukan di DPD, dan yang ketiga atau yang terakhir dilakukan di DPP. Dalam tahap penyaringan ini memiliki petugas seleksi yang sudahdibentuk oleh partai. Tahap yang keempat merupakan tahap penetapan calon yang diputuskan di dalam rapat pleno DPP Partai dengan mendengarkan anggota DPP yang bertugas di daerah masing-masing sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan calon. Selanjutnya tahap yang terakhir ialah tahapan sekolah partai yang merupakan tahapan bagi calon yang sudah diutus dan sudah diputuskan oleh DPP untuk melakukan pembelajaran dari kepala daerah yang diutus oleh PDI-Perjuangan dan terbilang sukses. (sumber: wawancara dengan Ketua DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Pesawaran, awal September 2021).

Berdasarkan temuan dari hasil penelitian bahwa tahapan rekrutmen yang digunakan oleh PDI-Perjuangan dalam Peraturan Partai No. 24 Tahun 2017 Tentang Rekrutmen dan Seleksi Calon Kepala Daerah terdapat kesesuaian dengan tahapan Menurut Haris Syamsuddin (2005:44), tahapan rekrutmen oleh partai politik secara umum mencakup tiga tahapan penting. Pertama penjaringan calon, merupakan tahapan penyeleksian yang paling pertama dari proses seleksi partai terhadap bakal calon kepala daerah maupun calon wakil kepala daerah dan juga pada tahapan ini merupakan bagian persyaratan administrasi dari internal partai.

Pada proses penjaringan dan penyaringan calon yang dilakukan oleh partai politik memiliki mekanisme yang sangat variatif dan tergantung pada kebijakan partai itu sendiri. Namun dalam beberapa indikator yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan calon kepala daerah terdapat beberapa hal yang sama, seperti tingkat pendidikan, pengalaman berorganisasi, latar belakang sosial, partisipasi dalam partai politik, prestasi serta hal-hal yang terkait dengan integritas dari pada calon kepala daerah.

Proses penjaringan calon internal partai juga dilaksanakan secara terbuka, karena pihak partai juga dalam substansinya akan menyeleksi kader-kader yang pantas untuk bisa lolos dan bisa menjadi calon pada partai tersebut termasuk sistem perekrutan politik yang di lakukan oleh partai PDI-Perjuangan. Dalam hal ini juga proses penjaringan calon kepala daerah pada hakekatnya dikenal dengan istilah rekrutmen politik. Dalam politik modern, proses rekrutmen harus terbuka bagi setiap orang tanpa membedakan jenis kelamin, suku atau atribut lainnya. Yang menjadi penentu

utama dalam perekrutan seseorang terletak pada kapabilitas, akseptabilitas, dan popularitas seseorang. Ada pun faktor-faktor yang mendukung seseorang untuk duduk dalam suatu jabatan publik diantaranya adalah karakteristik latar belakang sosial, sosilisasi politik yang dialami, aktifitas awal serta motivasi dan seleksi.

Saat melakukan rekrutmen anggota yang diproyeksikan menjadi kader partai hendaklah menggunakan persyaratan yang memuat ketentuan umum mengenai tingkatan atau jenjang organisasi kepartaian yang dikaitkan dengan promosi kader partai. Dalam penjaringan calon ini juga internal partai memperhatikan seperti tingkat pendidikan, yang dimana tujuan dari partai untuk bisa melihat apakah sumber daya manusia ini mampu dalam menjalankan tugasnya nanti, hal ini bisa di katakan partai akan melihat intelektual dari para kader yang akan menjadi calon eksekutif nantinya.

Sumber daya yang ada harus menunjang untuk bisa memegang tanggung jawab yang besar ketika terpilih nantinya. Kemudian pengalaman berorganisasi menjadi salah satu hal yang penting juga yang akan di lihat oleh partai dalam melakukan penjaringan calon ini karena pengalaman organisasi ini akan menjadi bukti bahwa seorang calon kader partai harus mampu berkomunikasi dengan baik dan juga bisa bekerja sama untuk bisa mencapai suatu tujuan yang di inginkan. Hal-hal seperti inilah yang harus di perhatikan kader partai untuk bisa menjadi calon kepala daerah.

Pada proses penjaringan, calon partisipasi dalam partai politik juga menjadi tolak ukur di dalam nya, karena ini juga bisa menjadi salah satu bukti untuk para calon bisa mengabdikan dirinya pada partai dan bisa mengikuti aturan – aturan partai yang sudah di tentukan. Dari data yang di peroleh juga proses penjaringan bakal calon kepala daerah dan bakal calon wakil kepala daerah ini dilaksanakan secara terbuka namun tetap memperhatikan orang-orang yang pantas untuk bisa masuk sebagai calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah.

Kedua, tahapan penyaringan dan Seleksi calon yang telah di jaring, pada tahapan ini tahap rekrutmen yang kedua dari proses rekrutmen partai terhadap bakal calon kepala daerah, proses ini berlaku untuk seluruh bakal calon kepala daerah dari PDI-Perjuangan. Pada tahapan ini, PDI-Perjuangan melakukan suatu terobosan untuk dapat meningkatkan partisipasi pemilih dalam memenangkan calon dari PDI-Perjuangan. Pada tahapan ini PDI-Perjuangan Kabupaten Pesawaran melakukan perekrutan calon kepala daerah yang notabene petahana kepala daerah di Kabupaten Pesawaran.

Selain itu, dalam penyaringan calon dan seleksi calon, internal partai PDI-Perjuangan memberikan pemahaman tentang dasar negara, undang-undang, dan juga cinta akan tanah air, dan bisa di katakan internal partai PDIP pada tahapan ini telah mengajarkan tentang pendidikan partai politik sesuai dengan ideologi yang ada pada partai tersebut.

Tujuan dari tahapan ini, untuk bisa mengajarkan dan memberikan pemahaman yang baik untuk para calon-calon internal partai, agar nantinya bisa memegang tanggung jawab yang besar dari masyarakat dan bisa mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ketiga, tahapan penetapan Calon, merupakan proses penetapan yang harus diikuti aturan yang sudah di tetapkan oleh partai PDI- Perjuangan,

dan khususnya PDI-Perjuangan tidak membeda-bedakan jabatan atau kedudukan sebagai calon kepala daerah. Dan pada proses ini juga bisa di katakan banyak hambatan-hambatan yang terjadi dalam perekrutan politik PDI-Perjuangan, karena ini merupakan tahapan terakhir yang ada. Proses penetapan adalah hasil rapat pleno partai yang sudah di putuskan bersama untuk menetapkan calon kandidat kepala daerah.

Proses penetapan harus mengikuti aturan yang sudah di tetapkan oleh PDI-Perjuangan, dan khususnya PDI-Perjuangan tidak membeda-bedakan jabatan atau kedudukan sebagai calon kepala daerah. Pada proses penetapan calon ini, internal partai PDI-Perjuangan melakukan rekapitulasi dari beberapa tahapan rekrutmen sebelumnya yang di dalamnya menjadi tolak ukur untuk bisa menjadi calon kepala daerah dari internal PDI-Perjuangan. Tetapi di dalam penelitian ini dan melihat dari beberapa informan yang menyampaikan tentang tahap penetapan calon yakni dilakukan oleh DPP PDI-Perjuangan karena keputusan dalam menentukan pasangan calon kepala daerah merupakan hak mutlak yang di miliki oleh pengurus DPP PDI-Perjuangan. (sumber: wawancara dengan Ketua DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Pesawaran, awal September 2021).

Di dalam tingkatan DPC melakukan penjaringan atau pendaftaran secara umum bagi kader maupun non kader yang memenuhi syarat yang ingin mencalonkan diri sebagai bupati dan wakil bupati di persilahkan dengan persyaratan tertentu yang sudah ditetapkan dalam aturan organisasi partai, setelah bakal calon kepala dan wakil kepala daerah terjaring DPC memberikan rekomendasi terkait hasil dari penjaringan kepada DP PDI-Perjuangan, setelah itu DPD mengirimkan rekomendasi kepada DPP PDI-Perjuangan, setelah sampai di tingkat DPP dengan berbagai pertimbangannya untuk memutuskan satu pasang calon prosesnya seperti itu. Syarat-syaratnya itu umum sama apa yang ditetapkan oleh KPU mungkin ada tambahan terkait komitmen membangun partai jika menang. (sumber: wawancara dengan Mantan Ketua DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Pesawaran, akhir September 2021).

Di tingkatan DPD merupakan seleksi lanjutan maka mereka melaksanakan seleksi berkas kembali, jika ada berkas yang masih kurang agar dilengkapi, setelah itu pelaksanaan wawancara di tingkat DPD terkait komitmen misalnya terpilih menjadi Bupati dalam rangka membangun Kabupaten Pesawaran seperti apa seperti visi misi. (sumber: wawancara dengan Mantan Ketua DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Pesawaran, akhir September 2021).

Karena idealitasnya dalam menentukan calon harus benar – benar orang yang mempunyai intelektual yang tinggi, berkualitas, dan loyalitas kepada partai agar masyarakat dapat melihat calon kepala daerah yang di utus oleh PDI-Perjuangan benar – benar berkualitas dan memang pantas untuk di calonkan pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020. (sumber: wawancara dengan Kepala Kesekretariatan DPD PDI-Perjuangan Provinsi Lampung, akhir Agustus 2021).

2. Pola Rekrutmen PDI-Perjuangan dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran.

Menurut Nazarudin Syamsudin (Tangkilisan, 2003:189), proses rekrutmen politik dibagi menjadi dua pola yaitu pola rekrutmen terbuka dan pola rekrutmen tertutup. Untuk melihat

pola rekrutmen Calon Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2020.

Sebelumnya peneliti telah melakukan penelitian lapangan. Hasil penelitian yang peneliti lakukan dilapangan menunjukan bahwa PDI-Perjuangan menggunakan pola rekrutmen terbuka, yaitu dengan cara membuka kesempatan seluas-luasnya bagi siapa saja untuk dapat bergabung dengan PDI- Perjuangan untuk mengikuti seleksi pemilihan calon kepala daerah di Kabupaten Pesawaran. (sumber: wawancara dengan Ketua DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Pesawaran, awal September 2021).

Pola rekrutmen yang digunakan oleh PDI-Perjuangan dalam melaksanakan rekrutmen terbuka. Mengapa saya katakana pola rekrutmen itu terbuka karena dilaksanakan dari DPC dan DPD semua orang bisa mendaftarkan diri untuk ikut dalam rekrutmen bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Namun, dalam penetapan calon kepala daerah dilakukan tertutup dan hanya Pengurus DPP yang mengetahui (sumber: wawancara dengan Mantan Ketua DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Pesawaran, akhir September 2021).

PDI-Perjuangan di dalam mekanisme rekrutmen menggunakan mekanisme rekrutmen terbuka. Dalam artian terbuka bagi siapapun yang memenuhi syarat dan ingin
mencalonkan diri menjadi calon kepala daerah dari PDI-Perjuangan. (sumber: wawancara dengan Kepala Kesekretariatan DPD PDI-Perjuangan Provinsi Lampung, akhir Agustus 2021).

Melihat sistem rekrutmen yang dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), peneliti dapat menyimpulkan secara sederhana bahwa mekanisme yang dilakukan oleh PDI-Perjuangan itu dibagi menjadi dua, pertama mekanisme terbuka dan yang kedua mekanisme tertutup.

Pada dasarnya sistem rekrutmen Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah yang dilakukan oleh PDI-Perjuangan terbagi menjadi dua yaitu sistem rekrutmen terbuka dan sistem rekrutmen tertutup, namun di Kabupaten Pesawaran DPC PDI-Perjuangan menggunakan sistem rekrutmen terbuka dalam hal melakukan penjaringan bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati Pesawaran. Disini dapat dilihat bahwa proses rekrutmen yangdilakukan oleh DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Pesawaran sangattransparan kepada publik, dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua kalangan masyarakat yang ingin mencalonkan diri sebagai calon bupati maupun calon wakil bupati, hal tersebut dapat dikatakan bahwa perekrutan yang dilakukan oleh DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Pesawaran dalam melakukan penjaringan bakan calon bupati dan bakal calon wakil bupati bersifat terbuka.

Proses perekrutan yang dilakukan DPC PDI-Perjuangan dilandaskan pada Peraturan Partai Nomor: 24 Tahun 2017 Tentang Rekrutmen dan Seleksi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. PDI Perjuangan memang memiliki peraturan internal partai yang spesifik untuk membahas mekanisme rekrutmen hingga penetapan calon kepala daerah. Mulai dari tingkat pusat DPP, hingga ke tingkat yang paling rendah yaitu Pengurus Anak Ranting yang ada di tingkat rukun tetangga.

Proses rekrutmen calon kepala daerah hingga penetapan calon kepala daerah. Mulanya DPP memberikan instruksi kepada DPD dan DPC untuk melakukan pemetaan daerah dan penjaringan bakal calon kepala daerah pilkada serentak 2020. Kemudian DPD dan DPC akan melakukan rekrutmen dan penjaringan bakal calon kepala daerah baik dengan cara terbuka maupun tertutup berdasarkan peraturan partai

yang berlaku. Setelah proses penjaringan dan perekrutan di laksanakan selanjutnya terdapat beberapa nama calon yang mendaftar dan telah lolos seleksi berkas di tingkat daerah. Selanjutnya nama- nama tersebut diserahkan kepada DPD jika penjaringan dan perekrutan dilakukan di tingkat DPC untuk dilakukan verifikasi di tingkat DPD, namun jika penjaringan berada di tingkat DPD maka nama calon tersebut akan langsung diserahkan ke DPP.

Serangkaian tes yang dilakukan oleh tim penjaringan di tingkat pusat sangat mempengaruhi atas keluarnya rekomendasi bagi calon-calon yang sudah mendaftar, terutama hasil dari survey yang dilakukan oleh tim penjaringan pusat, karena dari sinilah dapat diketahui calon mana yang memiliki presentase yang tinggi di mata masyarakat. Selain itu proses penetapan bakal calon bupati yang dilakukan oleh PDI-Perjuangan semua keputusan berada di tingkat pusat, daerah hanya menjadi penyelenggara penjaringan bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati. Tapi tidak tertutup kemungkinan bahwa DPC juga bisa memberikan masukan kepada DPP terkait calon yang dianggap memiliki presentase yang tinggi di masyarakat.

Menurut Nazaruddin Syamsudin (Tangkilisan, 2003:189), pola rekrutmen politik dibagi menjadi dua pola yaitu rekrutmen terbuka dan rekrutmen tertutup. Rekrutmen terbuka yaitu dengan menyediakan dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk ikut bersaing dalam proses penyeleksian. Dasar penilaian dilaksanakan melalui proses dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, melalui pertimbangan-pertimbangan yang objektif rasional, di mana setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi jabatan politik yang dipilih oleh rakyat mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi untuk mengisi jabatan baik jabatan politik maupun administrasi atau pemerintahan.

Rekrutmen tertutup yaitu adanya kesempatan untuk masuk dan dapat menduduki posisi politik tidaklah sama bagi setiap warga Negara, artinya hanya individu-individu tertentu yang dapat direkrut untuk menempati posisi dalam politik maupun pemerintah. Dalam sistem yang tertutup ini orang yang mendapatkan posisi elite melalui cara- cara yang tidak rasional seperti pertemanan, pertalian keluarga dan lain-lain.

Partai politik menjadi bagian dari kekuatan politik yang ada di Indonesia. Perannya sangat penting dalam sistem politik di Indonesia, ketika seseorang ingin menjadi pemimpin maka salah satu jalur untuk mewujudkan hal tersebut yaitu lewat partai politik. Partai politik juga menjadi sarana bagi masyarakat untuk menjadi penyambung lidah antara pemerintah dengan rakyat serta turut aktif dalam membuat kebijakan yang ditentukan oleh negara. Tidak bisa kita pungkiri bahwa peran partai politik di Indonesia sangat penting dan menjadi acuan bagi negara untuk menentukan kebijakan bagi masyarakat. Keterlibatan partai politik dalam pemerintahan sebenarnya bukan hal yang biasa, melalui partai politik aspirasi masyarakat dapat disampaikan dan dituangkan dalam bentuk apapun.

Dapat dilihat fenomena yang terdapat di Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran sosok Kol. (Purn) S. Marzuki yangtidak mendaftarkan diri sebagai bakal calon wakil Bupati dalam tahapan rekrutmen yang di selenggarakan oleh PDI-Perjuangan dari tingkat DPC maupun DPP melainkan hasil dari penunjukan atau penugasan yang dilakukan DPP PDI-Perjuangan, dalam mengusung Kol. (Purn) S. Marzuki untuk menjadi calon wakil Bupati dari Dendi Ramadhona yang terlebih dahulu diumumkan sebagai calon Bupati yang diusung dari PDI-Perjuangan.

Dapat di deskripsikan bahwa proses perkrutan hingga penetapancalon yang dilakukan oleh PDI-Perjuangan mulanya pada saat perekrutan bersifat terbuka karena DPP memberikan kewenangan kepada DPD maupun DPC untuk melakukan penjaringan bakal calon kepala daerah. DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Pesawaran menggunakan metode terbuka, namun dengan menetapkan calon yang mendapat rekomendasi dari DPP sebagai penunjukan, dapat dijelaskan bahwa semua prosedur seleksi dilakukan di tingkat pusat, mulai dari psikotes, tes bakat, hingga survei mandiri yang hasilnya hanya diketahui oleh tim yang dibentuk menjadi tim penjaringan. kelompok di tingkat pusat. PDI-Perjuangan memang menggunakan hirarki top-down untuk merekrut dan mengangkat calon unggulan daerah, namun pada akhirnya hanya Dewan Pimpinan Pusat yang memiliki kendali penuh terhadap calon mana yang mendapat rekomendasi.

Idealnya, calon ditentukan melalui proses seleksi politik yang dilakukan secara demokratis dan transparan. Karena dengan cara yang demokratisdan transparan, proses rekrutmen politik terkesan lebih terbuka. (sumber: wawancara dengan Mantan Ketua DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Pesawaran, akhir September 2021).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah di paparkan maka peneliti memiliki beberapa kesimpulan diantaranya sebagai berikut:

1. Tahapan Rekrutmen PDI-Perjuangan dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran, proses rekrutmen dan seleksi calon yang dilakukan partai sangat bervariasi dan bergantung pada kebijakan partai itu sendiri. Namun beberapa indikator yang digunakan sebagai dasar penetapan calon kepala daerah memiliki beberapa ciri umum, seperti: Proses pemilihan kader calon partai juga dilakukan secara transparan karena partai juga menyeleksi kader yang cocok untuk bergabung ke partai dan menjadi calon, antara lain langkah-langkah rekrutmen politik PDI-Perjuangan. Dalam hal ini, proses seleksi dan penyaringan calon direktur daerah pada hakekatnya disebut sebagai rekrutmen politik. DPP PDI-Perjuangan masih tertutup dalam pengambilan keputusan atau penetapan calon pengurus daerah. Dalam politik modern, rekrutmen harus terbuka untuk semua, terlepas dari jenis kelamin, asal etnis, atau karakteristik lainnya. Faktor utama dalam perekrutan adalah kemampuan, penerimaan dan popularitas orang tersebut. Terdapat pula faktor-faktor yang mendukung masuknya seorang individu ke dalam jabatan publik, antara lain karakteristik latar belakang sosial, pengalaman sosialisasi politik, aktivitas awal dan pendidikan, serta motivasi dan pemilihan.

2. Pola RekrutmenPDI-Perjuangan dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran, rekrutmen politik yang dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bersifat sentralistik karena proses rekrutmen diatur oleh pusat, sehingga daerah hanya dapat membuka pendaftaran, daerah hanya dapat mengajukan, dan semua calon yang terdaftar langsung berurusan dengan Pengurus Pusat. Dengan dibukanya pendaftaran calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah, maka dewan pimpinan daerah dan pengurus cabang mulai melaksanakannya dengan mengeluarkan Instruksi No. 356/IN/DPP/VIII/2019 Dewan Pimpinan Pusat Partai (DPP). Ketetapan untuk menjadi kandidat bakal calon kepala daerah dan bakal calon wakil kepala daerah yang akan

diumumkan menjadi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah untuk pilkada serentak 2020 tetap sepenuhnya berada di tangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai, tanpa intervensi DPD atau DPC. karena itu adalah hak prerogatif Dewan Pimpinan Pusat. Dari sisi rekrutmen terbuka, dapat dikatakan bahwa tahapan rekrutmen mulai dari tahapan penjaringan calon hingga pemilihan calon oleh PDI-Perjuangan belum sepenuhnya transparan karena masih ada hal-hal yang belum transparan dan belum melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan, seperti masyarakat dalam pemilihan calon melalui PDI-P.Jika dilihat bahwa rekrutmen terbuka terdiri dari melayani dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua warga negara untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan untuk menjadi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Dasar penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan syarat-syarat yang telah ditentukan melalui proses penilaian objektif, artinya siapa saja yang memenuhi persyaratan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang dipilih rakyat mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan peluang jabatan, baik jabatan di lembaga eksekutif maupun jabatan politik di lembaga legislatif. Proses rekrutmen yang dilakukan di tingkat DPC dan DPD tetap menganut prinsip rekrutmen terbuka karena PDI-Perjuangan lebih transparan dan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara yang ingin menjadi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Namun keputusan calon untuk menerima rekomendasi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah tidak bisa dikatakan terbuka karena tidak transparan. Ini kewenangan pimpinan partai. Pada tahap rekrutmen, idealnya kandidat diputuskan secara terbuka. Karena secara terbuka, model rekrutmen politik terlihat lebih bersih dan transparan. Dapat digambarkan di sini bahwa tahapan rekrutmen mulai dari pemilihan calon hingga penetapan calon oleh PDI-Perjuangan pada awalnya terbuka pada saat rekrutmen karena DPP memberikan kewenangan kepada DPD dan DPC untuk menyaring calon-calon pimpinan daerah yang memiliki peluang yang paling besar. DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Pesawaran menggunakan model rekrutmen politik terbuka, namun pada saat penetapan calon yang mendapat rekomendasi dari DPP bersifat penunjukkan atau istilah di dalam partai ialah penugasan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis ucapkan terima kasih kepada keluarga besar MIP Universitas Lampung yang telah membantu penelitian, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

BS, Wibowo Catur. 2017. *Potret Rekrutmen Politik di Indonesia.* Indocamp,Jakarta Selatan.

Budiarjo, Miriam. 2006. *Dasar-Dasar Ilmu Politik.* Gramedia Pustaka Utama,Jakarta.

Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif.* Kencana Perdana Media Grup,Jakarta.

Firmanzah. 2011. *Mengelola Partai Politik (Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik Di Era Demokrasi)*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

Harahap, Insan. 2017. *Kaderisasi Partai Politik Dan Pengaruhnya Terhadap Kepemimpinan Nasional.* Universitas Bakrie, Jakarta.

Haris dkk. 2016. *Panduan Rekrutmen & Kaderisasi Partai Politik Ideal Di Indonesia*. 1–113.

Haris, Syamsuddin. 2005. *Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai Proses Nominasi dan Seleksi Calon Legislatif Pemilu 2004.* PT Gramedia, Jakarta.

Huntington, Samuel P. 2003. *Tertib Politik di Tengah Pergeseran KepentinganMassa.* Raja grafindo persada, Jakarta.

J. Prihatmoko. 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung.* Pustaka Pelajar,Semarang.

Pamungkas, Sigit. 2011. Partai Politik Teori Dan Praktek Di Indonesia. Yogyakarta. Institute For Democracy And Welfarism.

Putra, Fadillah. 2003. *Partai Politik dan Kebijakan Publik.* Pustaka Pelajar,Yogyakarta.

Syafif kencana Inu Dan Ashari. 2005. *Sitem Politik Indonsia*. PT. Refika aditama.

Tangkilisan, Hesel N. 2003. Kebijakan Publik yang Membumi. Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia & Lukman Offset, Yogyakarta.

Jurnal

Irham, Muhammad Aqil. 2016. Korupsi Demokratis Dalam Partai Politik (Studi Kasus Penyelenggaraan Pemilukada Lampung. *Jurnal Sosiologi*, 21(1), 35- 36.

Mahadi, Helmi. 2011. Pragmatisme Politik: Studi KasusProses Rekrutmen Politik PDIP Pada Pilkada, Kabupaten Sleman. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 2(1), 38.

Muhammad. 2016. Kaderisasi Partai Politik Dan Kesiapannya Menghadapi Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015 : Kasus Usungan Non-Kader PDP PAN Kabupaten Majene. *The Politics : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 2(1), 110-120. ISSN: 2407-9138.